

ABSTRAK

Nama : Arief Fiadi Mochamad Hidayat
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul : Pemeriksaan Restitusi PPN atas Wajib Pajak Eksportir dan Pemberlakuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 (Suatu Tinjauan Untuk Meningkatkan Kepastian Hukum dan Mendeteksi Praktek Ekspor Fiktif)

Pada tanggal 15 Agustus 2006, Direktur Jenderal Pajak menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006. Peraturan ini diterbitkan seiring dengan maraknya berita tentang ekspor fiktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak - yang tidak lain merupakan salah satu bentuk kejahatan pajak (*Tax Evasion/Tax Fraud*) dengan memanfaatkan *loop hole* dari peraturan perundang-undangan dan kurangnya koordinasi antar perangkat negara yang terkait dengan transaksi ekspor. PER-122/PJ./2006 ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan restitusi dan sekaligus dapat mencegah terjadinya restitusi atas transaksi ekspor fiktif. Masalah yang diteliti dalam tesis ini adalah: Bagaimana proses pemeriksaan restitusi PPN dan teknik-teknik pemeriksaan alternatif atas Wajib Pajak Ekportir setelah diberlakukannya PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006? Lalu bagaimana dampak PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 terhadap kepastian hukum dan pelayanan kepada Wajib Pajak? Dan akhirnya bagaimana tindakan Wajib Pajak Eksportir dalam mensikapi ketentuan PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 untuk memperoleh hak restitusinya dengan proses yang sederhana dan tepat waktu? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dan Studi lapangan (*field research*) melalui wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan restitusi PPN setelah diberlakukannya PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 belum efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan pajak (*tax fraud*) yang berupa praktek ekspor fiktif. PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 belum memberikan solusi keadilan baik bagi Wajib Pajak maupun bagi fiskus karena tidak memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tidak mengatur secara jelas mengenai penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 tidak memberikan kepastian hukum mengenai bukti dan dokumen yang dipersyaratkan. Pemberlakuan PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 mengakibatkan proses, jangka waktu, dan dokumen yang dipersyaratkan dalam pemeriksaan restitusi PPN mengalami banyak perubahan. Untuk mengantisipasi perubahan itu, Wajib Pajak melakukan penyesuaian antara lain adalah dengan melakukan pembenahan administrasi dokumen pembelian dan penjualan, pemilihan lawan transaksi (*supplier*) yang memiliki kredibilitas baik dan melakukan pencatatan arus uang dan arus barang.

Kata kunci:

Restitusi, *tax evasion/tax fraud*, pemeriksaan pajak, ekspor fiktif, PPN

ABSTRACT

Name : Arief Fiadi Mochamad Hidayat
Study Program : Post Graduate Program of Accounting
Title : VAT Refund Auditing for Exporter Taxpayer and Implementation of the Director General of Taxes' Regulation Number PER-122/PJ./2006 of August 15th, 2006 (An Overview to Enhance Certainty and Detect Fraud in Export Practices)

PER-122/PJ./2006 has been determined by the Director General of Taxes on August 15th 2006. The regulation was published together with the spread of issues regarding fraud in export practices undergone by Taxpayer, which is one of the tax evasions/tax frauds that used the loop hole of the state regulation and lack of coordination among the respective government institutions. PER-122/PJ./2006 is aimed to enhance certainty and flexibility for Taxpayer to apply for VAT refund. It is also aimed to prevent fraud in export practices. There are three main points discussed in this study. First, it is about how to process VAT refund audit and the alternative techniques of Exporter Taxpayer after the implementation of PER-122/PJ./2006? Second, it is about what impacts resulted from PER-122/PJ./2006 toward certainty and services for Taxpayer? Finally, it is about how the Exporter Taxpayer will react upon the regulation to obtain their refund right in a simple and efficient way. This is a qualitative descriptive research. The data were collected by means of deep interview and library research. This research shows that the VAT refund auditing after the implementation of PER-122/PJ./2006 is still ineffective to prevent the fraud in export practices. PER-122/PJ./2006 has not brought fair solutions both for Taxpayer and Tax Officer as it gives imbalance between right and obligation. Not only for that reason, but also it does not reveal clear arrangement upon reward and punishment. Furthermore, PER-122/PJ./2006 gives no certainty about the required documents. The implementation of PER-122/PJ./2006 has caused a lot of changes in process, time limit, and required documents for VAT refund auditing. In order to anticipate those changes, Taxpayers have to do some adjustments such as reorganizing the purchasing and selling documents, choosing the suitable supplier which has good credibility and recording the flow of cash and goods.

Key words:

Refund, tax evasion/tax fraud, tax auditing, false export, VAT